**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**Peraturan Desa Tentang RKPDesa**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Latar Belakang

* 1. Landasan Hukum
  2. Maksud dan tujuan serta manfaat
  3. Visi dan misi
  4. Narasumber dan peserta

**BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

1. Luas Wilayah
2. Jumlah Penduduk
3. Batas Wilayah
4. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonogiri.

**BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA**

1. Kegiatan yang didanai APBDesa Tahun Anggaran 2024
2. Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2024
3. Kegiatan yang didanai APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024
4. Kegiatan yang didanai APBN Tahun Aggaran 2024

**BAB IV: PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN 2025**

1. Kegiatan yang Rencana didanai APBDesa Tahun Anggaran 2025
2. Kegiatan yang Rencana didanai APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2025
3. Kegiatan yang Rencana didanai APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025
4. Kegiatan yang Rencana didanai APBN Tahun Aggaran 2025
5. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025 yang diusulkan ke MUSRENBANGCAM Tahun 2026
6. Daftar Nama Delegasi Musrenbangkec 2025

**BAB IV : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan

**BAB V : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

1. Rumusan Prioritas Masalah
2. Identifikasi Masalah
3. Rencana Program Dan Pembangunan Desa

**BAB VI : PENUTUP**

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, yang senantiasa telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang ini dengan lancar dan sesuai waktu yang ditargetkan.

Laporan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) ini kami susun dengan maksud sebagai acuan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.

Disamping itu, laporan ini kami harapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi serta sebagai sarana evaluasi di tahun berikutnya agar supaya lebih baik.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu melaksanakan program ini semua tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen serta lembaga-lembaga desa yang ada di Desa Wonogiri serta peran serta semua pihak terkait.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung sehingga pelaksanaan jalanya pemerintahan bisa berjalan sesuai prosedur mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Alloh SWT senantiasa memberikan petunjuk serta bimbinganya kepada kita semua dalam mewujudkan harapan untuk meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik menuju kepada pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan Pengelolaan Keuangan yang *Acountable*, Transparan dan sesuai peraturan yang berlaku.

Wonogiri, 15 September 2025

Tim Penyusun RKPDesa

Ketua

**MUHAMMAD KHUSNI AL AMIN**

**BAB I**

* 1. **Latar Belakang**

Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatakan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara parsitipatif guna pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pembangunan Parsitipatif adalah suatu system pengelolaan pembangunan di tingkat Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenanganya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat Gotong Royong.Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.Untuk mengkoordinasikan pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping professional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Pembangunan Desa mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan,
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMDesa dan RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dalam rangka amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sejalan pemikiran dimaksud diatas, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis Desa dalam waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupaka Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang pada pelaksanaanya dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan.

RKPDesa merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

* 1. **Landasan Hukum**

|  |
| --- |
| 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); |
| 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
| 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; |
| 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; |
| 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; |
| 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa |
| 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; |
| 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; |
| 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa; |
| 1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005- 2025; |
| 1. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5); |
| 1. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa; |
| 1. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang; |
| 1. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026; |
| 1. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. |
| 1. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; |
| 1. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/155/KEP/13/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
| 1. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor Nomor : 050/1699/13/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (PERUBAHAN RPJM DESA), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2025 Dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP DESA) Tahun 2026 |
| 1. Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2024; |
| 1. Peraturan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2024; |

* 1. **Maksud dan Tujuan serta Manfaat**

1. Maksud

Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa serta perumusan Program Kerja Pemerintah Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, serta agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

1. Tujuan
2. Menetapkan RKPDesa untuk Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan akan dibiayai oleh APBDesa.
3. Merumuskan Prioritas usulan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2025 yang akan diusulkan ke SKPD pelaksana kegiatan melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 2026.
4. Memilih serta menetapkan delegasi Desa untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan Tahun 2026.
5. Manfaat
6. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa
7. Menjadi kerangka dan acuan bagi seluruh perangkat pemerintah Desa beserta seluruh stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang akan didanai APBDesa sesuai ketentuan yang berlaku
8. Kegiatan pembangunan di desa akan lebih terarah
9. Mendorong partisipasi masyarakat dalam swadaya serta gotong royong.
   1. **Visi Dan Misi**

Sebagai dokumen perencanaan penjabaran dari dokumen RPJMDesa, maka seluruh rencana program serta kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan haruslah dapat sejalan dengan Visi Misi Desa.

Visi dan Misi Desa Wonogiri adalah Visi dan Misi calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, kemudian ditetapkan menjadi Visi dan Misi Desa Wonogiri yang telah diintegrasikan dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat Desa yang dituangkan dalam RPJMDesa, dimana proses penyusunanya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga atau Tingkat Dusun Hingga Tingkat Desa.

Adapun Visi dan Misi Desa Wonogiri adalah sebagai berikut :

**a.Visi**

***“TERWUJUDNYA DESA WONOGIRI YANG LEBIH MAJU DAN MANDIRI”***

**b.Misi :**

1. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan sumber daya manusia;
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Desa;
5. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan desa;
6. Optimalisasi sumber daya alam pertanian dan perikanan;
7. Pengembangan Sektor Wisata Desa dan UMKM;
8. Pengembangan BUMDesa;
   1. **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Kelembagaan Desa ;
2. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui Pemberdayaan Masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Sarana dan Prasarana Desa agar desa menjadi maju dan mandiri;
5. Melaksanakan Pelestarian dan pengembangan kebudayaan desa;
6. Terwujudnya optimalisasi sumber daya alam Peternakan pertanian dan perikanan;
7. Terwujudnya Sektor Wisata Desa dan UMKM di beberapa lapisan masyarakat;
8. Terwujudnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk kesejahteraan masyarakat Desa ;
   1. **Arah Kebijakan Umum**
9. **Permasalahan pokok Desa Wonogiri**

Permasalahan pokok yang dihadapi Desa Wonogiri adalah masih banyaknya sarana prasarana dasar yang belu memadai seperti masih banyaknya jalan poros desa yang rusak dalam keadaan parah serta jalan lingkungan yang belum tertata secara rapi. Kurangnya sumber air sebagai bahan utama pengairan tanaman petani serta masih banyak bangunan liar yang belum tertata. Kurangsadarnya masyarakat untuk memajukan potensi desa karena tingkat pendidikan yang masih jauh dari wajib belajar. Permasalahn tersebut menyebabkan banyaknya dana yang harus dianggarkan untuk membangun sarana dan pelatihan masyarakat.

1. **Arah Kebijakan Pembangunan Desa Wonogiri**

Berdasarkan jarring aspirasi masyarakat yang dilakukan lima kali dalam tiga bulan oleh tim penyusun RPJM Desa Wonogiri maka kebijakan pembangunan akan dilakukan selama lima tahun kedepan melalui program dan kegiatan berikut:

* 1. Pembangunan sarana prasarana yang meliputi:
     + 1. Jalan poros desa
       2. Jalan lingkungan
       3. Irigasi
       4. Gorong-gorong
       5. Jembatan desa
       6. Sarana olahraga
       7. Talud jalan
       8. Cor blok jalan
       9. Pengaspalan jalan
  2. Pembangunan nonfisik meliputi:
  3. Wajib belajar minimal 9 tahun
  4. Peningkatan kegiatan kepemudaan
  5. Pemberdayaan perempuan (PKK, posyandu, kader kesehatan, dasa wisma)
  6. Peningkatan simpan pinjam desa
  7. Peningkatan lumbung desa Giri Manunggal
  8. Peningkatan kesehatan melalui kebersihan lingkungan dan pribadi
  9. Penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat
  10. Kelompok tani/gapoktan.
  11. Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa;
  12. Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa;
  13. Intensif RT dan RW;
  14. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
  15. Tunjangan operasional BPD;
  16. Belanja operasional Pemerintahan Desa;
  17. Program Pelayanan Dasar;
  18. Program pelayanan dasar infrastruktur;
  19. Program kebutuhan primer pangan;
  20. Program pelayanan dasar pendidikan;
  21. Penguatan BUMDesa;
  22. Program peningkatan pelayanan kesehatan;
  23. Program kebutuhan primer Sandang;
  24. Program Ekonomi produktif;
  25. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
  26. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
  27. Program dana bergulir;
  28. Program pembangunan moral dan akhlak
  29. Program pembangunan infrastruktur berkelanjutan
  30. Program Ketahanan Pangan Desa;
  31. Program Penanganan Kebencanaan, Darurat dan Mendesak
  32. Pencegahan dan Penaggulangan Covid-19
  33. Percepatan penguatan ekonomi masyarakat pasca dampak covid-19
  34. Bantuan Langsung Tunai;
  35. Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana di Desa;
  36. **Narasumber Dan Peserta**

1. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan dalam Musrenbang Desa, antara lain : Kepala Desa atau perangkat Desa, Ketua atau unsur Badan Permusyawaratan Desa, Camat atau aparat kecamatan, UPT Dinas/ Badan, kepala sekolah, Pendamping Desa dan lembaga lain yang bekerja di desa atau kecamatan bersangkutan.

1. Peserta

Peserta musrenbang desa adalah perwakilan komponen masyarakat (individu/kelompok) yang berada di desa, meliputi : kepala dusun, wakil RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur perempuan (sekurang-kurangnya 30%), unsur masyarakat miskin, wakil kelompok anak, remaja/pemuda, organisasi kemasyarakatan, pengusaha, kelompok tani, buruh, komite sekolah, unsur lembaga pemberdayaan masyarakat desa (seperti BKM, KPMD, Karang Taruna dan dsb), wakil lembaga kemasyarakatan Desa, dll sesuai kondisi Desa

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**

Desa Wonogiri merupakan bagian tidak terpisahkan dari 29 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kajoran.Desa Wonogiri secara geografis terletak di sebelah Barat Daya dari Ibu Kota Kecamatan Kajoran. Jarak Desa Wonogiri dengan Ibu Kota Kecamatan Kajoran adalah 7 km dan jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Magelang adalah 33 km.Desa Wonogiri merupakan Desa perbukitan, yang terletak pada ketinggian 438-750 DPL.

Mata pencaharian penduduk Desa Wonogiri mayoritas adalah petani dan pekebun.

Luas Wilayah

Tanah Sawah : 52 ha

Tegal : 169,1 ha

Pekarangan : 93 ha

Lainnya : 0,9 ha

Jumlah : 315 ha

Jumlah Penduduk : 2.532 Jiwa

Laki-Laki : 1.275 jiwa

Perempuan : 1.257 jiwa

Jumlah Kepala Keluarga : 831 KK

Jumlah Dusun : 4 Dusun

Jumlah RT : 28 RT

Jumlah RW : 04 RW

Batas wilayah

Sebelah Barat : Desa Wuwuharjo

Sebelah Selatan : Desa Margoyoso Kec. Salaman

Sebalah Utara : Desa Kuwaderan

Sebelah Timur : Desa Kaliabu Kec. Salaman

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA WONOGIRI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **NOMOR SK** | **TANGGAL SK** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Junarsih | Kepala Desa | 180.182/627/KEP/01/2016 | 19/11/2016 |
| 2 | Muhammad Khusni Al Amin | Sekretaris Desa | 180.192/011/KEP/001/2018 | 27/08/2018 |
| 3 | Nuril Imron | Kasi Pemerintahan | 188.4/001/KEP/X/2011 | 21/11/2011 |
| 4 | Anang Turcholis | Kasi Kesra | 188.192/015/KEP/001/2021 | 29/07/2017 |
| 5 | Khanif Masykur | Kasi Pelayanan | 180.192/011/KEP/001/2018 | 27/08/2018 |
| 6 | Evi Lailatul Fitriya | Kaur Keuangan | 180.192/011/KEP/001/2018 | 27/08/2018 |
| 7 | Makmuron | Kaur Umum | 180.4/003/KEP/1/2005 | 02/01/2005 |
| 8 | Sabar Aminudin | Kadus Ngemplak | 180.192/011/KEP/001/2018 | 27/08/2018 |
| 9 | Makdudat | Kadus Tuwanan | 180.4/003/KEP/1/2005 | 28/09/2006 |
| 10 | Agus Makrifatulloh | Kadus Salakan | 180.192/011/KEP/001/2018 | 27/08/2018 |
| 11 | Alwi Ashar | Kadus Sabrang | 188.192/007/KEP/001/2021 | 29/04/2021 |

**BAB III**

**EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa TAHUN SEBELUMNYA**

Pelaksanaan RKPDesa tahun 2024 pada prinsipnya Program dan kegiatan serta pembangunan Desa Wonogiri mengacu pada Perubahan RPJMDesa tahun 2022 – 2030.

Dalam penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun APBDesa mengacu pada beberapa kretiria antara lain sebagai berikut :

1. Menjadi prioritas dalam RPJMDesa;
2. Tingkat Kemendesakan;
3. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Tingkat kemanfaatan bagi kualitas hidup masyarakat;
5. Kebutuhan biaya;
6. Luas cakupan kegiatan.
7. Kegiatan yang didanai APBDesa Tahun Anggaran 2024 adalah :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA** | |
| 1.01 | Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | |
| 1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | |
|  | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa | |
|  | 2 | Penyediaan Tunjangan Kepala Desa | |
| 1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | |
|  | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa | |
|  | 2 | Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa | |
| 1.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
|  | 1 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa | |
|  | 2 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa | |
| 1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | |
|  | 1 | Operasional Pemerintah Desa | |
|  | 2 | Honor PKPKD dan PPKD | |
|  | 3 | Asosiasi | |
|  | 4 | Pemeliharaan Sarpras Perkantoran | |
| 1.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | |
|  | 1 | Tunjangan Kedudukan BPD | |
| 1.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | |
|  | 1 | Operasional BPD | |
| 1.01.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa | |
|  | 1 | Biaya Koordinasi Pemerintah Desa | |
|  | 2 | Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial | |
|  | 3 | Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa | |
| 1.01.90 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
|  | 1 | Tambahan Tunjangan Kepala Desa | |
|  | 2 | Tambahan Tunjangan Perangkat Desa | |
| 1.01.93 | Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa non SOTK dan Staf Perangkat Desa | |
|  | 1 | Tunjangan Staf Perangkat Desa/Penjaga | |
| 1.03 | Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |
| 1.03.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | |
|  | 1 | Pemutakhiran Administrasi Umum dan Kependudukan | |
| 1.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*) | |
|  | 1 | Pemutakhiran Profil Desa | |
| 1.03.03 | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | |
|  | 1 | Pengelolaan Kearsipan Desa | |
| 1.03.90 | Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa/Indeks Desa Membangun (IDM) | |
|  | 1 | Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) | |
| 1.04 | Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | |
| 1.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | |
|  | 1 | Musrenbang Desa | |
|  | 2 | Musyawarah Pembahasan APBDES | |
|  | 3 | Musrenbang Desa (MMD Kesehatan ) | |
| 1.04.02 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | |
|  | 1 | Musyawarah Dusun | |
| 1.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | |
|  | 1 | Penyusunan Dokumen RKP Desa | |
| 1.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | |
|  | 1 | Penyusunan Dokumen APBDesa | |
|  | 2 | Penyusunan Dokumen Perubahan APBDesa | |
|  | 3 | Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban APBDesa | |
| 1.04.05 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | |
|  | 1 | Inventarisasi Aset Desa | |
| 1.04.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | |
|  | 1 | Penyusunan LPPD dan LKPPD | |
|  | 2 | Penyampaian Informasi LPPD dan LKPPD kepada Masyarakat | |
|  | 3 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBDEsa | |
| 1.05 | Sub Bidang Pertanahan | |
| 1.05.02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | |
|  | 1 | Regisitrasi Agenda Pertanahan | |
| 1.05.06 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | |
|  | 1 | Upah Pungut PBB | |
| **2** | **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA** | |
| 2.01 | Sub Bidang Pendidikan | |
| 2.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | |
|  | 1 | Penyelenggaraan PAUD Desa Wonogiri | |
| 2.01.08 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa | |
|  | 1 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Taman Bacaan Desa Wonogiri | |
| 2.01.10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | |
|  | 1 | Bea Siswa Kepada Siswa-Santri Miskin | |
|  | 2 | Bea Siswa Kepada Siswa-Santri Berprestasi | |
| 2.02 | Sub Bidang Kesehatan | |
| 2.02.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | |
|  | 1 | Opersional PKD | |
|  | 2 | Opersional POSBINDU | |
| 2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | |
|  | 1 | Operasional Posyandu | |
|  | 2 | PMT Balita dan Lansia | |
| 2.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | |
|  | 1 | Forum Kesehatan Desa | |
|  | 1 | Operasional Ambulance Desa | |
| 2.02.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | |
|  | 1 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | |
| 2.02.97 | Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu | |
|  | 1 | Fasilitasi Gerakan Stunting Terpadu | |
| 2.02.98 | Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina | |
|  | 1 | Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina | |
| 2.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 2.03.01 | Pemeliharaan Jalan Desa | |
|  | 1 | Pembersihan Jalan Desa (PKTD) | |
| 2.03.02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | |
|  | 1 | Pembersihan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang (PKTD) | |
| 2.03.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa \*\*) | |
|  | 1 | Pengaspalan Jalan TUWANAN Desa Wonogiri | |
| 2.03.13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa \*\*) | |
|  | 1 | Pembangunan Jembatan Milik Desa | |
|  | 2 | Pembangunan Jembatan Desa dusun tuwanan Rt 16 Rw 02 Desa Wonogiri, Kec. Kajoran, Kab. Magelang | |
| 2.03.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | |
|  | 1 | Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | |
| 2.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | |
| 2.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | |
|  | 1 | Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | |
|  | 2 | JAMBANISASI | |
| 2.04.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah \*\*) | |
|  | 1 | Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah | |
| 2.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | |
|  |  | Sosialisasi tentang Informasi Publik | |
|  | 1 | Verval SIK NG dan SIKDJ | |
|  | 2 | Bimtek Petugas Lapangan dan Operator Desa | |
|  | 3 | PUSKESOS | |
|  | 4 | Bimtek Peningkatan PUSKESOS dan Perangkat tentang Kesejahteraan Sosial | |
|  | 5 | Pengadaan Identitas Petugas | |
| 3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | |
| 3.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | |
| 3.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes (Satlinmas) | |
|  | 1 | Peningkatan Kapasitas Satlinmas | |
| 3.01.04 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | |
|  | 1 | Pelatihan OPRB/LPBD Skala Desa | |
| 3.01.90 | Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat di Luar Pemilikan Hak-Hak Perdata | |
|  | 1 | Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat di Luar Pemilikan Hak-Hak Perdata | |
|  | 1.1 | Honorarium RT (27 Org x 12 Bulan ) | |
|  | 1.1 | Honorarium RW (4 Org x 12 Bulan ) | |
| 3.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | |
| 3.02.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, H.Raya Keagamaan dll) | |
|  | 1 | Khaul Pejuang Kemerdekaan dan Pepunden Desa | |
|  | 2 | Peringatan HUT RI | |
| 3.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | |
| 3.03.06 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | |
|  | 1 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan Tingkat Desa | |
| 3.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | |
| 3.04.90 | Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa | |
|  | 2 | Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa. | |
| **4** | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | |
| 4.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | |
| 4.02.02 | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | |
|  | 1 | Perawatan Kandang Ternak BUMDEsa(PKTD) | |
|  | 2 | Pemanfaatan Lahan Kosong Milik Desa(PKTD) | |
| 4.02.03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | |
|  |  | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | |
|  | 1 | Rabat Beton JUT Pengkol Tuwanan (Prog.Ketahanan Pangan) | |
|  | 2 | Rabat Beton JUT Munggang Kidul (Prog.Ketahanan Pangan) | |
|  | 3 | Rabat Beton JUT Mberah (Prog.Ketahanan Pangan) | |
|  | 4 | Rabat Beton JUT Bleber (Prog.Ketahanan Pangan) | |
|  | 5 | Jembatan JUT Kali Jaro jalan ke sabrang (Prog.Ketahanan Pangan) | |
|  | 6 | Rabat Beton JUT Sabrang (Prog.Ketahanan Pangan) | |
|  | 7 | Talud JUT Sabrang Lor (Prog.Ketahanan Pangan) | |
|  | 8 | Rabat Beton JUT Salakan jl.pak taslim) (Prog.Ketahanan Pangan) | |
|  | 9 | Rabat Beton JUT Rabat beton Jln gebang(Prog.Ketahanan Pangan) | |
|  | 10 | Rabat Beton JUT Jalur RT 10 Tuwanan (Prog.Ketahanan Pangan) | |
|  | 11 | Talud JUT Jalur RT 14 Tuwanan (Prog Ketahanan Pangan) | |
|  | 12 | Talud JUT Salakan (Prog Ketahanan Pangan) | |
| 4.02.05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | |
|  | 1 | Pelatihan/Bimtek Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan (Program Ketahanan Pangan dan Hewani) | |
| 4.02.91 | Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan | |
|  | 1 | Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan | |
| 4.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | |
| 4.03.02 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | |
|  | 1 | Peningkatan Kapatitas Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 4.03.03 | Peningkatan Kapasitas BPD | |
|  | 1 | Peningkatan Kapasitas BPD | |
| 4.03.90 | Peningkatan Kapasitas PPKD dan TPK Barang/Jasa | |
|  | 1 | Peningkatan Kapasitas PPKD, TPK Barang/Jasa | |
| 4.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | |
| 4.04.01 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | |
|  | 1 | Pelatihan Pemberdayaan Perempuan(Ketahanan Pangan) | |
| 4.04.02 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | |
|  | 2 | Penyuluhan Perlindungan Anak | |
| 5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | |
| 5.01 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | |
| 5.01.01 | Kegiatan Penanggulanan Bencana | |
|  | 1 | Sarana prasarana tanggap darurat bencana | |
|  | 2 | Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana | |
|  | 3 | Pelayanan tanggap darurat bencana | |
| 5.02 | Sub Bidang Keadaan Darurat | |
| 5.02.01 | Penanganan Keadaan Darurat | |
|  | 1 | Keadaan Darurat | |
| 5.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | |
| 5.03.01 | Penanganan Keadaan Mendesak | |
|  | 1 | Bantuan Bahan Pangan | |
|  | 2 | Bantuan Pendidikan | |
|  | 3 | Bantuan Pengobatan | |
|  | 4 | Program BLT Dana Desa | |
|  |  |  | |
| **6** | **BIDANG PEMBIAYAAN II** | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | |
| 6.2.2.01 | Penyertaan Modal Desa | |
|  | 1 | Penyertaan Modal BUM Desa | |
| 6.2.2.02 | Dana Cadangan | |
|  | 1 | Dana Cadangan | |

1. Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Pengaspalan Jalan Desa Tuwanan

1. Kegiatan yang didanai APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024 adalah :
   * + 1. Pembangunan Jembatan RT 16 RW 04 Dusun Tuwanan
       2. Pembangunan RTLH
       3. Jambanisasi
2. Kegiatan yang didanai APBN Tahun Anggaran 2024 adalah :

**BAB IV**

**USULAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2025**

Pelaksanaan RKPDesa tahun 2025 pada prinsipnya Program dan kegiatan serta pembangunan Desa Wonogiri mengacu pada Perubahan RPJMDesa tahun 2022 – 2030.

Dalam penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun APBDesa mengacu pada beberapa kretiria antara lain sebagai berikut :

1. Menjadi prioritas dalam RPJMDesa;
2. Tingkat Kemendesakan;
3. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Tingkat kemanfaatan bagi kualitas hidup masyarakat;
5. Kebutuhan biaya;
6. Luas cakupan kegiatan.
7. Kegiatan yang akan rencan terdanai dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2025 adalah :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
|  |  | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
|  |  | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
|  |  | 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
|  |  | 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ADD) |
|  |  | 5 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (BHR) |
|  |  | 6 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (PAD) |
|  |  | 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (HONOR PKPKD DAN PPKD) (ADD) |
|  |  | 8 | Penyediaan Tunjangan BPD |
|  |  | 9 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
|  |  | 10 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
|  |  | 11 | Penyediaan Operasinal Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa |
|  |  | 12 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa |
|  |  | 13 | Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa non SOTK dan Staf Perangkat Desa |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.2 | Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa |
|  |  | 1 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
|  |  | 2 | CCTV |
|  |  | 3 | Audio Ruangan |
|  |  | 4 | Pemasangan Ruang Meeting dengan Sistem Teleconference “Skype” |
|  |  | 5 | meja rapat / meja meeting direksi / meja meeting table /meeting kantor - 180x320(6seat) |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.3 | Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
|  |  | 1 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa \*\*) |
|  |  | 2 | Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa/Indeks Desa Membangun (IDM) |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.4 | Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
|  |  | 1 | Musyawarah Pembahasan APBDES |
|  |  | 2 | Musrenbang Desa(Khusus Kesehatan/MMD) |
|  |  | 3 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
|  |  | 4 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RKPDesa |
|  |  | 5 | Penyusunan Dokumen APBDesa |
|  |  | 6 | Penyusunan Dokumen Perubahan APBDesa |
|  |  | 7 | Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban APBDesa |
|  |  | 8 | Penyusunan LPPD dan LKPPD |
|  |  | 9 | Penyampaian Informasi LPPD dan LKPPD kepada Masyarakat |
|  |  | 10 | KEGIATAN MONEV APBDES |
|  |  | 11 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
|  |  | 12 | Pengembangan Sistem Informasi Desa |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.5 | Sub Bidang Pertanahan |
|  |  | 1 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) |
| 2 | Pembangunan Desa | 2.1 | Sub Bidang Pendidikan |
|  |  | 1 | Penyelenggaraan PAUD /Operasional PAUD |
|  |  | 2 | Honor/insentif Guru PAUD (3 orang) |
|  |  | 3 | Peningkatan Sarana/Prasarana Taman Bacaan Desa Wonogiri |
|  |  | 4 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin |
|  |  | 5 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Berprestasi |
| 2 | Pembangunan Desa | 2.2. | Sub Bidang Kesehatan |
|  |  | 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Insentif Petugas PKD) |
|  |  | 2 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(POSBINDO) |
|  |  | 3 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) |
|  |  | 4 | Forum Kesehatan Desa |
|  |  | 5 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
|  |  | 6 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
|  |  | 7 | Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu |
|  |  | 8 | Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tri Bina |
| 2 | Pembangunan Desa | 2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|  |  | 2.3.9 | Pemeliharaan Jalan |
|  |  | 1 | Pemeliharaan Jalan Desa |
|  |  | 2.3.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa \*\*) |
|  |  | 1 | Pembangunan Jalan Desa Ngemplak Bleber |
|  |  | 2 | Pembangunan Jalan Desa Tuwanan |
|  |  | 3 | Pembangunan Jalan Desa Salakan Tangkil |
|  |  | 4 | Pembangunan Jalan Desa Sabrang Bompon |
|  |  | 5 | Pembangunan Jalan Desa Ngemplak Bleber (P.Harwanto - Ngemplak) |
|  |  | 2.3.11 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman \*\*) |
|  |  | 1 | Pelebaran Jalan (Bahu Jalan) ( dari Gardu Mbah Tuan - Tangkil)/Sijengat |
|  |  | 2 | Pembangunan Jalan (Bp.Sukamto - Nglegok) Tangkil |
|  |  | 3 | Rabat Beton ( Jalan Lingkar Bompon ) |
|  |  | 4 | Pembangunan Jalan (Tri Soleh-Jembatan) |
|  |  | 2.3.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) |
|  |  | 1 | Drainase Tuwanan (P.Hisyam – Gading) |
|  |  | 2 | Drainase ( Depo P.Badrus - Bu . Siti/Basuki) |
|  |  | 3 | Pembangunan Talud (Mbak Fitri Sabrang) |
|  |  | 4 | Pembangunan Talud (Makam salakan) |
| 2 | Pembangunan Desa | 2.4 | Sub Bidang Pariwisata |
|  |  | 1 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Desa Dan Pembentukan POKDARWIS |
| 2 | Pembangunan Desa | 2.5 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
|  |  | 2.4.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah \*\*) |
|  |  | 1 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah \*\*) Ngemplak Bleber |
|  |  | 2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah \*\*) Tuwanan |
|  |  | 3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah \*\*) Salakan Tangki |
|  |  | 4 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah \*\*) Sabrang Bompon |
|  |  | 2.4.15 | Pembangunan/Pengelolaan Penerangan Jalan Desa |
|  |  | 1 | Pembangunan/Pengelolaan Penerangan Jalan Desa |
|  |  | 2 | Pembangunan/Pengelolaan Penerangan Jalan Desa |
|  |  | 3 | Pembangunan/Pengelolaan Penerangan Jalan Desa |
|  |  | 4 | Pembangunan/Pengelolaan Penerangan Jalan Desa |
| 2 | Pembangunan Desa | 2.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
|  |  | 2.04.92 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
|  |  | 1 | Kegiatan PUSKESOS |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | 3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
|  |  | 1 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa |
|  |  | 2 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa |
|  |  | 3 | Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat di Luar Pemilikan Hak-Hak Perdata |
|  |  | 3 | Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat di Luar Pemilikan Hak-Hak Perdata |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | 3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |
|  |  | 1 | TIRAKATAN (KHAUL )-PHBI 2025 |
|  |  | 2 | HUT RI DESA WONOGIRI 2025 |
|  |  | 3 | Pembinaan Kerukunan Umat Beragama |
|  |  | 4 | Pembangunan Sarana Prasarana Keagamaan (Belanja Jam Digital Masjid ANNUR) |
|  |  | 5 | PELATIHAN DAN PEMBETUKAN TIM PENDATAAN ADAT SENI BUDAYA LOKAL DESA |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | 3.2 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
|  |  | 1 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
|  |  | 2 | Pelatihan Mc /Pidato, Sinoman (Karangtaruna) (5 kali Pertemuan) |
|  |  | 3 | Pelatihan Olah Raga(5 kali Pertemuan) |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 4.1 | Sub Bidang Pertanian |
|  |  | 1 | Pembelian Kambing (27 EKOR) |
|  |  | 2 | Optimalisasi Kelompok Tani Di Dusun |
|  |  | 3 | Pelatihan Peternakan Milenial (Gapoktan) |
|  |  | 4 | Pelatihan Penyembelihan Hewan |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 4.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
|  |  | 1 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
|  |  | 2 | Peningkatan Kapasitas PPKD dan TPK Barang-Jasa |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 4.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
|  |  | 1 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan(PKK) |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 4.4 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) |
|  |  | 2 | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM(Pelatihan Dan Pembetukan Tim Pendataan UMKM) |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 4.5 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian |
|  |  |  | Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa |
|  |  | 1 | Pelatihan Konten Creator |
|  |  | 2 | Pemanfaatan Limbah Tepes |
|  |  | 3 | Pelatihan Pembuatan Abon |
| 5 | Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 4.5 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana |
|  |  | 1 | Kegiatan Penanggulanan Bencana |
| 5 | Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 4.5 | Sub Bidang Keadaan Darurat |
|  |  | 1 | Penanganan Keadaan Darurat |
| 5 | Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | 4.5 | Sub Bidang Keadaan Mendesak |
|  |  | 1 | Penanganan Keadaan Mendesak(BLT DANA DESA) |
| 6 | PEMBIAYAAN | 6.1 | Pembiaayan 2 |
|  |  | 1 | Penyertaan Modal Desa |

1. Kegiatan yang akan di usulkan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2025 adalah :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **DUSUN** | **PENGAJUAN** | **ANGGARAN** | **VOLUME** |
| 1 | NGEMPLAK BLEBER | PEMBANGUNAN RTLH | 200.000.000 | 10 PENERIMA |
| 2 | TUWANAN | PEMBANGUNAN RTLH | 200.000.000 | 10 PENERIMA |
| 3 | SALAKAN | PEMBANGUNAN RTLH | 200.000.000 | 10 PENERIMA |
| 4 | SABRANG BOMPON | PEMBANGUNAN RTLH | 200.000.000 | 10 PENERIMA |
| 5 | NGEMPLAK BLEBER | JAMBANISASI | 98.750.000 | 25 PENERIMA |
| 6 | TUWANAN | JAMBANISASI | 98.750.000 | 25 PENERIMA |
| 7 | SALAKAN | JAMBANISASI | 98.750.000 | 25 PENERIMA |
| 8 | SABRANG BOMPON | JAMBANISASI | 98.750.000 | 25 PENERIMA |

1. Kegiatan yang akan di usulkan APBD Propinsii Tahun Anggaran 2025 adalah :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **DUSUN** | **PENGAJUAN** | **ANGGARAN** | **VOLUME** | **PENGUSUL** |
| 1 | SABRANG-SALAKAN(PETEAN) | Pengaspalan Jalan Desa | 200.000.000 | 400mx 3m x 0,02 | M.KHUSNI AL AMIN |
| 2 | SALAKAN | Pengaspalan Jalan Desa | 100.000.000 | 200mx 3m x 0,02 | M.KHUSNI AL AMIN |
| 3 | SALAKAN | Pengaspalan Jalan Desa | 200.000.000 | 400mx 3m x 0,02 | M.KHUSNI AL AMIN |
| 4 | SABRANG | Jalan Usaha Tani (JUT) | 150.000.000 | 300m x3mx0,12 | M.KHUSNI AL AMIN |
| 5 | NGEMPLAK | Jalan Usaha Tani (JUT) | 150.000.000 | 300m x3mx0,13 | M.KHUSNI AL AMIN |
| 6 | BLEBER | Jalan Usaha Tani (JUT) | 150.000.000 | 300m x3mx0,13 | M.KHUSNI AL AMIN |
| 7 | BOMPON  (JALAN BENGKOK) | Jalan Usaha Tani (JUT) | 150.000.000 | 300m x3mx0,12 | M.KHUSNI AL AMIN |
| 8 | TUWANAN | Jalan Usaha Tani (JUT) | 150.000.000 | 300m x3mx0,12 | M.KHUSNI AL AMIN |

1. Kegiatan yang akan di usulkan APBN Tahun Anggaran 2025 adalah :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **DUSUN** | **PENGAJUAN** | **ANGGARAN** | **VOLUME** | **PENGUSUL** |
| 1 | SABRANG - BLEBER | Pengaspalan Jalan Desa | 800.000.000 | 1200mx 3m x 0,02 | M.KHUSNI AL AMIN |
| 2 | BLEBER- KALIPELUS | Pengaspalan Jalan Desa | 800.000.000 | 1200mx 3m x 0,02 | M.KHUSNI AL AMIN |
| 3 | GADING-TUWANAN | Pengaspalan Jalan Desa | 800.000.000 | 1200mx 3m x 0,02 | M.KHUSNI AL AMIN |
| 4 | TUWANAN(SIDROJOK) | Pengaspalan Jalan Desa | 800.000.000 | 1200mx 3m x 0,02 | M.KHUSNI AL AMIN |

1. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025 yang diusulkan ke MUSRENBANGCAM Tahun 2026

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Bidang / Jenis Kegiatan** | | | **Volume** | | | **Prakiraan Waktu Pelaksanaan** | | **Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan** |
| **Bidang** | **Jenis Kegiatan** |  | | |  | |  | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***5*** | | | ***8*** | | ***9*** | |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Pengadaan Mobil Siaga Bencana | 1 (satu) | | Unit | November 2026 | | 450.000.000 | |
| 2 | Pembangunan Desa | Pembangunan Aspal Jalan Desa | 1 (satu) | | paket | Juli 2026 | | 250.000.000 | |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan | 4(dua) | | DUSUN | September 2026 | | 400.000.000 | |
| 3 | Pembinaan Kemasyarakatan | Pengadaan Mesin Pengolah Sampah | 4 (dua) | | DUSUN | September 2026 | | 400.000.000 | |
| 5 | Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa | Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana | 1 (satu) | | paket | Juli 2026 | | 100.000.000 | |

1. Daftar Nama Anggota Delegasi/Peserta Musrenbang Kecamatan Tahun 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **Alamat ( Dsn, RW )** | **Uraian / Penjelasan** | **Ket.** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Junarsih | Ngemplak Ds Wonogiri | Kepala Desa | wakil delegasi bidang Pemerintahan |
| 2 | Miftahyatul Arifah | Bleber Ds Wonogiri | Tokoh Perempuan | wakil delegasi bidang Pembinaan |
| 3 | M.Khusni Al Amin | Sabrang Ds Wonogiri | Sekretaris Desa | wakil delegasi bidang Pembangunan |
| 4 | Bambang Priyanto | Ngemplak Ds Wonogiri | BPD | wakil delegasi bidang Pemberdayaan |

**BAB IV**

**GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat 1, bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. **Pendapatan Desa**

Kebijakan pengelolaan pendapatan Desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber – sumber pendapatan terutama Pendapatan Asli Desa.

Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil asset desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain – lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
6. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Republik Indonesia
7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
8. Lain – lain pendapatan asli desa yang sah.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarka asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2024 dengan estimasi peningkatan berdasrkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagi hasil, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | | **PENDAPATAN** | **APBDES PENETAPAN(RP)** | **APBDES PERUBAHAN (RP)** |
| **4** | **1** | **Pendapatan Asli Desa** | | **33.000.000** | **33.000.000** |
|  |  | A | Hasil Usaha Desa |  |  |
|  |  | 1 | Bagi Hasil BUMDes | 2.500.000 | 2.500.000 |
|  |  | 2 | Lain-lain Hasil Usaha Desa | - | - |
|  |  | B | Hasil Aset Desa | - | - |
|  |  | 1 | Pengelolaan Tanah Bengkok | 30.500.000 | 30.500.000 |
|  |  | 2 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | - | - |
|  |  | C | Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | - | - |
|  |  | 1 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong | - | - |
|  |  |  |  |  | - |
|  |  | B | Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong | - | - |
|  |  | 1 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong | - | - |
| **4** | **2** | **Pendapatan Transfer** | | **1.993.716.364** | **2.004.323.620** |
|  |  | 1 | Dana Desa (DD) | 1.030.004.000 | 1.030.004.000 |
|  |  | 2 | Bagi Hasil Pajak (BHP) | 28.409.203 | 36.900.412 |
|  |  | 3 | Bagi Hasil Retribusi (BHR) | 4.804.401 | 3.170.448 |
|  |  | 4 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 580.498.760 | 580.498.760 |
|  |  | 5 | Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000 | 203.750.000 |
|  |  | 6 | Bantuan Keuangan Kabupaten | 150.000.000 | 150.000.000 |
|  |  |  |  |  | - |
| **4** | **3** | **Pendapatan lain lain** | | **5.869.450** | **5.869.450** |
|  |  | 1 | Pendapatan Lain (Intensifikasi Pajak PBB) | 5.869.450 | 5.869.450 |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | | | **2.032.585.814** | **2.043.193.070** |

1. **Belanja Desa**

Kebijakan belanja desa digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan desa selama satu tahun.

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban pemerintah desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 100 huruf a dan b yang berbunyi :

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
3. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Operasional pemerintah desa;
5. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
6. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Kelompok belanja tersebut di atas dibagi menjadi beberapa kegiatan yang telah dituangkan di dalam RKPDesa, diantaranya adalah :

1. Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran / pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa.

1. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran / pembelian serta pengadaan barang yang nilai gunanya kurang dari 12 (dua belas) bulan, diantaranya adalah atk, benda pos, bahan / material, pemeliharaan, penggandaan, biaya sewa tempat, sewa perlengkapan, sewa peralatan kantor, makan dan minum rapat, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif RT dan RW.

1. Belanja modal.

Belanja modal adalah pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai gunanya lebih dari 12 (dua belas) bulan

1. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga adalah belanja yang dilakukan dalam keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak diharapkan berulang atau mendesak, diantaranya adalah bencana alam, bencana social dan kerusakan sarana dan prasarana dan lain sebagainya.

Adapun belanja desa tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BELANJA | | | | | | | |
| 5 | | | BELANJA | APBDES  PENETAPAN(RP) | APBDES  PERUBAHAN (RP) |
| 5 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | 724.782.080 | 716.669.336 | |
| 5 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | 677.846.880 | 680.946.880 | |
| 5 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | | 144.405.000 | 144.155.000 | |
| 5 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | 372.822.000 | 372.762.000 | |
| 5 | 5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa | | 54.185.000 | 55.615.000 | |
| **Jumlah Belanja** | | | | **1.974.040.960** | **1.970.148.216** |

1. **Pembiayaan Desa**

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan, terdiri atas :

* Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
* Pencairan dana cadangan
* Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

1. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari :

* Pembentukan dana cadangan
* Penyertaan modal desa

Penerimaan pembiayaan pada pos sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) adalah pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Kegunaan SILPA dapat menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja dan juga untuk mendanai pelaksanaan lanjutan serta mendanai kewajiban lainnya sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

Penerimaan pembiayaan pada pos pencairan dana cadangan adalah dana yang bersumber pada penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaanya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut masuk ke dalam rekening tersendiri yang nantinya ditetapkan dengan peraturan desa melalui rekening kas desa.

Penerimaan pembiayaan pada pos hasil penjualan kekayaan desa yang terpisahkan adalah kekayaan desa yang dipisahkan yakni kekayaan milik desa baik bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMDesa.Hasil epnjualannya digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan pada pos pembentukan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan oleh satu tahun anggaran. Sumber pembentukan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan cadangan ditetapkan dengan peraturan desa yang paling sedikit memuat :

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
2. Program dan kegiatan yang dibiayai
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
4. Sumber dana cadangan
5. Tahun anggaran pelaksanaan

Dana cadangan ditempatkan pada rekening sendiri dan penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

Adapun Pembiayaan desa tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | | | **PEMBIAYAAN 1 (SILPA 2023)** | **APBDES PENETAPAN(RP)** | **APBDES PERUBAHAN (RP)** |
| **6** | | **BIDANG PEMBIAYAAN I** | |  |  |
| **5.02.01** | | | **Penanganan Keadaan Darurat** |  |  |
|  |  | 1 | Keadaan Darurat | 300.000 | 300.000 |
| **1** |  | **BIDANG PEMERINTAHAHAN DESA** | | - |  |
|  |  | **1** | **Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa** | - |  |
|  |  | 1 | Belanja ATK Pemdes | 326.460 | 326.460 |
|  |  | **1** | **Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa** | - |  |
|  |  | 1 | Belanja ATK Pemdes | 828.686 | 828.686 |
| **PEMBIAYAAN 1** | | | | **1.455.146** | **1.455.146** |
| **6** | | | **PEMBIAYAAN 2** | **APBDES PENETAPAN(RP)** | **APBDES PERUBAHAN (RP)** |
| **6.2.2.01** | | | **Penyertaan Modal Desa** | **-** |  |
|  |  | 1 | Penyertaan Modal BUM Desa | 60.000.000 | 60.000.000 |
| **6.2.2.02** | | | **Dana Cadangan** | **-** |  |
|  |  | 1 | Dana Cadangan | - |  |
| **PEMBIAYAAN 2** | | | | **60.000.000** | **60.000.000** |

**BAB V**

**RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

1. **Rumusan Prioritas Masalah**

Penentuan prioritas masalah untuk mengetahui sejauh mana masalah tersebut dapat teratasi dengan menggunakan sebuah metode pemecahan masalah.

Penentuan prioritas masalah dapat dilakukan dengan cara kuantitatif atau kualitatif berdasarkan data serta perhitungan kemudahan dan kemampuan untuk dapat diselesaikan berdasarkan situasi dan kondisi lingkungan sosial, politik, dan budaya yang ada dimasyarakat serta waktu dan pendanaan yang dilperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Untuk itu dalam menentukan prioritas masalah dapat dilakukan dengan pembentukan kelompok kerja yang akan mendiskusikan, merumuskan dan menetapkan kriteria masalah.

Sumber data dan informasi kebijakan pembangunan desa tahun sebelumnya yang diperlukan dalam penetapan prioritas program tahun yang akan datang berdasarkan :

1. Pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota kelompok;
2. Saran dan pendapat para narasumber;
3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;
4. Analisa situasi dan sumber informasi atau referensi lainnya.
5. **Identifikasi Masalah**

Beberapa rumusan identifikasi masalah pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Bidang pembangunan wilayah fisik atau infrastruktur
2. Masih terbatasnya anggaran kegiatan bidang pembangunan desa, sehingga ada beberapa sarana prasarana desa yang seharusnya memerlukan rehabilitasi atau pemeliharaan belum bisa terlaksana
3. Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemukiman
4. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya
5. Masih terbatasnya kesadaran dan peran masyarakat dalam menjaga asset desa
6. Pembangunan kawasan desa yang belum optimal
7. Pembangunan kawasan pariwisata desa yang masih minim anggaran
8. Bidang ekonomi
9. Masih terbatasnya Pendapatan Desa dan adanya kegiatan pencegahan bencana sehinga belum sepenuhnya menunjang Penguatan Modal bagi BUMDesa.
10. Masih terbatasnya pemberdayaan ekonomi masyarakat
11. Keterbatasan modal dan manajemen serta SDM bagi pelaku usaha kecil dan menegah
12. Bidang sosial budaya
13. Terbatasnya upaya-upaya masyarakat pada kegiatan pembinaan generasi muda dan pengembangan olahraga, seni budaya dan sosial.
14. Belum terwujudnya pola hidup sehat bersih di masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan.
15. Belum tertatanya sanitasi lingkungan yang baik
16. Dibeberapa lingkungan pemukiman penduduk rentan terjadi bencana
17. Masih terbatsnya pengembangan seni dan budaya masyarakat
18. Keterlibtan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relative rendah
19. Bidang pemerintahan
20. Masih kurangnya kapasitas lembaga masyarakat desa yang ada
21. Pelayanan publiK dengan bimbingan teknologi dan informasi komunikasi yang dilakukan pemerintah desa belum optimal
22. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa saat ini belum maksimal dikarenakan ada beberapa perangkat desa yang masih kosong.
23. **Rencana Program dan Pembangunan Desa**

Program dan kegiatan pembanguanan Desa Wonogiri pada prinsipnya mengacu pada empat bidang yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun program pembangunan Desa Wonogiri tahun 2025 sebagi berikut:

1. Bidang pemerintahan
2. Program pengembangan data profil desa berbasis teknologi informasi
3. Program peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
4. Program peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah desa
5. Pelayanan administrasi, pertanahan , dan PBB
6. Pembangunan kantor Desa
7. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana kantor desa
8. Bidang pembangunan
9. Pembangunan bidang Pendidikan meliputi Dukungan Operasional TPQ, PAUD Desa, TK Pertiwi, TK Desa dan PErpustakaan Desa
10. Pembangunan bidang Kesehatan meliputi Dukungan Operasional Kegaitan Posyandu, Posbindu, PKD, Desa Siaga, Fasilitasi KB, Pelatihan Kesehatan dan Fasilitasi Pencegahan Stunting
11. Pembangunan Perkerasan Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani
12. Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Desa
13. Pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong
14. Pembangunan talud jalan
15. Penyediaan sarana air bersih berskala desa
16. Pembangunan sanitase lingkungan dan pengelolaan limbah
17. Pembangunan Jaringan Komunikasi Desa
18. Pembangunan Pasar desa
19. Pembangunan sarana prasarana lainnya.
20. Bidang pembinaan masyarakat
21. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan masyarakat
22. Pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan Desa
23. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Desa
24. Pembinaan Kelembagaan Struktural Desa
25. Bidang pemberdayaan masyarakat
26. Pemberdayaan kelompok Tani dan Ternak
27. Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
28. Pemberdayaan Kelompok Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga
29. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah
30. Dukungan penanaman Modal
31. Pemberdayaan Perdagangan dan Perindustrian
32. Bidang Penanganan Bencana dan keadaan Darurat dan Mendesak
33. Pemulihan dan Penanganan Pasca pandemi Covid-19
34. Bidang Mendesak dan Darurat
35. Bantuan Lansung Tunai Dana Desa
36. Keadaan Mendesak

**BAB VI**

**PENUTUP**

1. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmendan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat yang saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembanguan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawabanjuga monitoring serta evaluasi akan lebih menjamin kelangsungan pembangunan di desa.

Perlu kita ketahui bersama bahwa laporan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ini secara rutin disusun setiap tahun anggaran.

Berdasarkan data yang tertuang dalam RKPDesa Tahun 2025 secara garis besar pelaksanaan RKPDesa Wonogiri yang telah dituangkan ke dalam APBDesa dapat berjalan dengan lancar, meskipun demikian banyak sekali hambatan dan kendala dalam pelaksanaanya, mengingat adanya kegiatan-kegiatan yang tidak terduga dan tidak terencana.

Peningkatan dan kelancaran pelaksanaan program-program tersebut merupakan bukti adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang saling bahu membahu, selaras serta adanya rasa kebersamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pemerintah yang didukung oleh para tokoh masyarakat yang duduk dalam kelembagaan yang ada di Desa Wonogiri serta peran serta segenap lapisan masyarakat Desa Wonogiri walaupun tidak sepenuhnya lapisan masyarakat mengetahui dan memahami tugas, fungsi semua unsur Aparat Pemerintah Desa.

1. Saran-saran

Mudah mudahan menjadi bahan masukan, acuan dan inspirasi bagi pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Desa kedepan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme serta tidak menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk lebih meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat untuk menuju kepada pemerintahan desa yang baik.

Demikian Laporan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2025 ini kami buat, tentunya masih banyak kekurangan dalam penyusunanya, kami atas nama Pemerintah Desa Wonogiri mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wonogiri,15 September 2024

Kepala Desa Wonogiri

**J U N A R S I H**